BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar memiliki keanekaragaman hayati dan sumber daya alam (SDA) yang potensial bagi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dengan share Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020 sebesar 35,3 persen (ASEAN Secretariat, 2021). Perekonomian yang kuat disertai permintaan domestik yang baik membuka peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan (Bank Pembangunan Asia, tahun 2019.).

Pada Juli 2021, Bank Dunia mengategorikan Indonesia kembali dalam negara Berpendapatan menengah ke bawah setelah sebelumnya termasuk dalam kategori Berpendapatan menengah ke atas. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia sejak Maret 2020. Pandemi secara umum bukan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan saja tetapi juga pemicu awal terjadinya krisis ekonomi di negara-negara yang terdampak (Prawoto et al., 2020). Selain itu, pandemi Covid-19 tampaknya berdampak pada seseorang secara tidak proporsional di berbagai kelompok sosial ekonomi dan bervariasi

menurut etnis, pendapatan, usia, jenis kelamin, dan kelompok atau komunitas sosial (Siddique et al., 2022).

Implikasi Covid-19 terhadap ekonomi diawali sebagai guncangan negatif pada penawaran (Guncangan penawaran negatif) yang menyebabkan dua hal yaitu banyak tenaga kerja yang terinfeksi sebagai penggerak kegiatan ekonomi dan pembatasan menekan kegiatan ekonomi yang berjalan (Suryahadi et al., 2020).

Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 tercatat mengalami penurunan sebesar 2,19 persen. (y-on-y) (BPS, 2021). Konsumsi rumah tangga sebagai komponen pengeluaran terbesar mengalami kontraksi sebesar 2,63 persen. Pandemi telah menyebabkan krisis yang mengurangi tingkat kesejahteraan, sehingga diperkirakan rata-rata kesejahteraan global stagnan atau bahkan menurun antara 2019-2020 akibat penurunan pertumbuhan pendapatan (World Bank, 2021). Baker et al. (2020) mengungkapkan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami penurunan, terutama selama periode pembatasan sosial, terutama di sektor pariwisata, hiburan, dan layanan akomodasi makan dan minum. Kemiskinan dan kekurangan merupakan satu kesatuan yang selalu menempel didalam bayangan seseorang, dan kemiskinan dapat dikatakan sebagai masalah sosial universal. Perasaan miskin dirasakan ketika selalu merasa iri dengan kehidupan orang lain yang memiliki penghasilan tinggi. Kemiskinan menjadi suatu permasalah

utama yang selalu terjadi bagi banyak negara di dunia, terutama negara berkembang.

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan banyak masyarakat miskin tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga memperburuk pengangguran dan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024, diperlukan sinergi antar program dan kerja sama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Instruksi ini menekankan pentingnya kolaborasi karena kemiskinan ekstrem adalah masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

Kemiskinan menjadi masalah sosial yang selalu dikaji dan masih banyak terjadi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah kondisi pendapatan yang tidak terjamin, kebutuhan dasar yang rendah, keterbatasan akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang layak. Menurut Sungkuwo Edy Mulyono (2017), kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk karakter dan pola hidup masyarakat miskin. Selain itu, kemiskinan memicu masalah sosial lain seperti k pengangguran, kelaparan, kesenjangan sosial, masalah kesehatan, dan kriminalitas.

Robert Lawang (2012) menyebut kemiskinan ekstrem sebagai kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan, dengan

pendapatan di bawah US$1,91 PPP per kapita per hari atau sekitar Rp9.089 per hari.

Data menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia menurun setiap tahun: pada 2021 sebanyak 26,50 juta jiwa, turun menjadi 20,01 juta jiwa pada 2022, dan pada 2023 menjadi 18,19 juta jiwa. Meskipun terus menurun, kemiskinan ekstrem tetap perlu menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, Kota Parepare memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Penelitian ini difokuskan pada kantor BAPPEDA Kota Parepare untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, serta peran yang akan dimainkan oleh BAPPEDA dalam penanggulangan masalah ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Parepare"**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Kota Parepare?
2. Bagaimana strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk memahami peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kota Parepare.
2. Untuk memahami strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrim yang ada di Kota Parepare?

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai referensi, masukan, serta pertimbangan untuk evaluasi dan peningkatan kinerja pemerintah, khususnya dari sisi teori yang relevan:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang berkaitan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan memberikan masukan bagi pemerintah mengenai peran pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Kemiskinan

Menurut Edi Suharto (2017), kemiskinan adalah masalah global yang mempengaruhi seluruh dunia. Setiap negara pasti menghadapi kemiskinan, yang menjadi salah satu tantangan besar dalam mencapai kesejahteraan sosial. Kemiskinan kultural adalah jenis kemiskinan yang lebih disebabkan oleh sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak mereka dalam kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi standar norma dan nilai yang ada di masyarakat. Kemiskinan juga bisa dilihat sebagai ketidaksetaraan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Menurut Friedman, basis kekuasaan sosial meliputi:

a. Modal produktif seperti aset, tanah, perumahan, peralatan, dan akses kesehatan.
b. Sumber keuangan, termasuk pendapatan dan kredit yang memadai.
c. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi.

d. Jaringan sosial yang memungkinkan akses ke pekerjaan, barang, pengetahuan, dan keterampilan.
e. Informasi yang bermanfaat untuk kehidupan.

Penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan dapat dibagi dalam beberapa dimensi, yaitu:

a. Kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi menciptakan negara pemenang dan kalah, dengan negara maju sebagai pemenang dan negara berkembang sering terpinggirkan oleh persaingan pasar bebas. Akibatnya, kemiskinan di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan negara maju.
b. Kemiskinan terkait pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan seringkali menghasilkan kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan yang muncul karena pembangunan yang meminggirkan wilayah desa, atau kemiskinan perkotaan yang disebabkan oleh ketidakmerataan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.
c. Kemiskinan sosial. Dimensi ini berfokus pada kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tertentu, seperti kemiskinan yang dialami perempuan, anak-anak, atau kelompok minoritas. Faktor sosial yang menyebabkan hal ini bisa berupa bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi.

d. Kemiskinan konsekuensial. Dimensi ini menyoroti faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan kepadatan penduduk yang tinggi.

Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab munculnya kemiskinan dalam masyarakat. Selanjutnya, masyarakat miskin dibagi menjadi dua kategori, yaitu fakir dan miskin. Menurut Muhtadi Ridwan (2018) fakir adalah golongan masyarakat yang sangat miskin dan sulit keluar dari kemiskinan karena tidak memiliki kemampuan yang memadai. Sedangkan masyarakat miskin adalah golongan masyarakat yang hidup dibawah rata-rata kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilannya.

Kemiskinan membuat manusia menderita dan terhambat mengembangkan kemanusiaannya. Penderitaan ini nyata dalam realitas merebaknya kasus-kasus seperti penyakit busung lapar, kekurangan gizi dan penyakit lainnya di beberapa daerah indonesia menurut meneth (2018) kelompok yang memiliki ketidak mampuan mengakibatkan masyarakat yang tergolong miskin berperilaku dan berpola hidup miskin, yang pada dasarnya tidak menikmati kemerdekaan untuk berusaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi.

2. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Indikator utama dari kemiskinan ekstrem adalah penduduk dengan pendapatan di bawah US$1,91 PPP (Paritas Daya Beli) per kapita per hari (setara dengan Rp10.739 per hari). Berikut adalah tabel yang menunjukkan kategori Kemiskinan Ekstrem:

Tabel 2. 1 Klasifikasi Kemiskinan Ekstrem

No	Kategori	Per Hari	Per Bulan
1	Perorangan	Rp 10.739,00	Rp 322.170,00
2	Keluarga	-	Rp 1.288.680,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai miskin ekstrem jika pendapatannya kurang dari Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per orang per bulan. Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), jika total pengeluaran keluarga tersebut kurang dari atau setara dengan Rp1.288.680 per bulan, maka keluarga tersebut termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan ekstrem, seperti keterbatasan akses terhadap sumber ekonomi dan

hambatan struktural terhadap mata pencaharian, menjadi tantangan utama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.

Selain itu, kekurangan gizi yang menghambat pemenuhan kebutuhan gizi seimbang membuat penduduk miskin ekstrem mengalami perkembangan intelektual yang lambat dan menjadi kurang produktif. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya hidup sehat serta ketiadaan jaminan kesehatan membuat mereka rentan terhadap dampak ekonomi akibat masalah kesehatan. Akses terbatas terhadap informasi dan pendidikan juga menghalangi individu untuk memperoleh pendidikan formal atau informal, yang menyebabkan mereka kekurangan keterampilan dan kemampuan bersaing di pasar kerja Selain itu, terbatasnya akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan transportasi mengurangi produktivitas keluarga miskin ekstrem Misalnya, kesulitan dalam mengakses jalan yang baik dan transportasi murah membuat petani sulit untuk bersaing dalam menjual produk mereka, y ang berdampak pada rendahnya pendapatan mereka (Nasikun: 2018).

3. Konsep Strategi

Dalam suatu upaya, pelaksanaan strategi yang terencana untuk mencapai tujuan lewat tertentu untuk kepentingan tertentu dari organisasi atau pun perorangan pastinya dibutuhkan suatu manajemen agar tujuan dari organisasi bisa tercapai sesuai rencana.

Sementara itu, manajemen merupakan startegi yang digunakan pemimpin dalam mengimplementasikan kemampuannya pada suatu organisasi Manajemen dalam makna pengelolaan organisasi dipahami dalam arti menyeluruh yaitu, yang meliputi berbagai dimensi diantaranya; perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Dimensi manajemen, sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang dijelaskan oleh George R. Terry, dikenal dengan istilah POAC, yang merupakan singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (Abbas, Syahrizal: 2008):

a. **Planning** atau perencanaan adalah kegiatan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai serta merencanakan cara dan sumber daya yang akan digunakan untuk mencapainya.
b. **Organizing** atau pengorganisasian adalah proses pengelolaan dan penataan semua sumber daya yang ada dalam organisasi, baik itu sumber daya manusia maupun material.
c. **Actuating** atau penggerakan adalah aktivitas untuk menggerakkan dan mengendalikan semua sumber daya organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
d. **Controlling** atau pengawasan adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa anggota organisasi dapat bekerja

sama dengan baik dan bergerak menuju pencapaian tujuan serta sasaran organisasi secara efektif.

4. Pengertian Strategi

Terdapat berbagai macam pengertian strategi yang dijelaskan oleh para ahli dalam buku-buku mereka masing-masing. Kata "strategi" berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani, yang merupakan gabungan dari *Stratos* (tentara) dan *Ego* (pemimpin). Sebuah strategi memiliki dasar atau kerangka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, strategi pada dasarnya merupakan alat untuk meraih tujuan.

Menurut Ismail Sholihin dalam bukunya yang ditulis oleh Ahmad yang berjudul *Manajemen Strategis*, strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang terdiri dari kata *stratus* (militer) dan *ag* (kepemimpinan). Aktivitas yang dilakukan seorang jenderal dalam merencanakan strategi untuk menaklukkan dan memenangkan perang adalah definisi awal dari strategi. Sementara itu, menurut Natang Fatah dalam buku *Manajemen Strategis* yang juga ditulis oleh Ahmad, strategi adalah prosedur yang sistematis untuk melaksanakan rencana yang komprehensif dan berjangka panjang dalam mencapai tujuan. Strategi juga dapat dipahami sebagai rencana tindakan yang menjelaskan bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Ahmad : 2020)

5. Pemerintah Daerah

Menurut Nurmi Chatim (2016) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah.

Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan Negara, agar tiap sektor tujuan Negara dapat bersamaan dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas Negara kepada alat-alat kekuasaan Negara (C.S.T kansil:2017).

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sebuah tatanan atau struktur pemerintahan yang terdiri dari individu-individu yang memegang kekuasaan dalam suatu negara, yang saling berhubungan secara fungsional antara organ-organ negara, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Pemerintah atau Government dalam bahasa indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang

atas kegiatan Orang-orang yang berada dalam suatu negara, negara bagian, atau kota, serta lembaga atau badan yang terkait. menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah. Wilayah atau daerah dapat diartikan sebagai bagian dari permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah atau area yang digunakan untuk tujuan tertentu; ruang lingkup tempat yang dipakai untuk kepentingan khusus; area sekitar atau yang dimaksud dalam konteks lingkungan suatu kota; serta tempat yang terdampak oleh suatu peristiwa.(. Setya Nugraha, R. Maulina f : 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

6. Pembangunan Daerah

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis,

dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atu kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepskan sebagai usaha pemerintah belaka. (Selvia Wulandari, 2022)

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Selvia Wulandari, 2022)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju sustu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Selvia Wulandari, PRISIP MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBAGUNAN INFASTRUKTUR DI KABUPATEN KATINGAN (Studi Di Desa Tumbang Lahang), 2022)

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakt yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi. Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya. (Selvia Wulandari, PRISIP MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBAGUNAN

INFASTRUKTUR DI KABUPATEN KATINGAN (Studi Di Desa Tumbang Lahang), 2022)

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata (Nurridha, 2014). Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. (Selvia Wulandari, PRISIP MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBAGUNAN INFASTRUKTUR DI KABUPATEN KATINGAN (Studi Di Desa Tumbang Lahang), 2022)

7. Kesejahteraan Sosial

Menurut (Lusya Vivi Gorahe, 2021) Kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat

beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilainilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Program-program dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang disusun harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun perencanaan yang menyusun program-program kesejahteraan masyarakat atau yang membangun kegiatan usahanya pada suatu daerah harus dilakukan analisis kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan analisis, kebutuhan harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, bukan hanya keinginan beberapa orang baik tokoh masyarakat maupun kepala desa yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan. Pembangunan masyarakat mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. (Lusya Vivi Gorahe, 2021)

8. Kebijakan Publik

Kebijakan yang berhubungan dengan publik disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan publik lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuat kebijakan

publik disebut dengan stakeholder. Stake holder dalam pembuatakan kebijakan publik adalah pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan azaz kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah hubungan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari hasil akhir kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah. Kekurangan dari sebuah kebijakan publik dapat diketahui setelah kebijakan tersebut terlaksana sedangkan keberhasilan dari sebiuah kebijakan publik tersebut dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan setelah pelaksanaan kebijakan. (Desrinelti Desrinelti, 2021)

Pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Pelaksanaan kebijakan memiliki luaran berupa aksi, aktivitas, mekanisme dan tindakan yang di bingkai dalam sebuah sistem. Pelaksanaan kebijakan dapat juga diartikan sebagai sebuah aktivitas yang terencana dan dilakukan dengan sunggih-sungguh dengan dilandasi denagn acuan norma yang disesuaikan untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang disepakati. (Desrinelti Desrinelti, 2021)

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya semata dilaksanakan oleh lembaga adminstrasi yang telah ditetapkan. Namun juga pelaksanaan kebijakan publik juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat berupa kekuataan sosial, ekonomi dan

politik serta keterlibatan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan dengan tepat sasaran, proa katif dan berdaya guna akan menghasilkan luaran kebijakan yang dapat memecahkan berbagai permasalahan. Semakin kompleks permasalahan yang dihadapi maka diperlukan proses analisis yang lebih dalam maka diperlukan teori-teori dan modal yang luas agar dapat memahami proses pelakanaan kebijakan tersebut. Proses analisis kebijakan perlu dilakukan agar dapat berpengaruh terhadap kebijakan yang dilahirkan. Pengkajian pelaksanaan kebijakan dilaksanakan dengan tujuan agar kebijakan yang dilahirkan bersifat problem solving dan mengutamakan kepentingan masyarakat (Desrinelti Desrinelti, 2021)

9. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (community development) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan pembangunan masyarakat (community development) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan

kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan sustainable development yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis. (Noor, 2011)

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat peoplecentered, participatory, empowerment and sustainable (Chamber, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal. (Noor, 2011)

Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat

pertumbuhan ekonomi itu sendiri. (Noor, 2011)

10. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai peningkatan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan perkataan lain arah dari pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (quntitative change) dan bisanya dihitung dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (total market value) dari barang akhir dan jasa (final goods and service) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. (Masloman, 2018)

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh

unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. (Masloman, 2018)

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. (Masloman, 2018)

B. Penelitian Terdahulu

1 Penelitian Akhmad Fatikhurrizqi dan Bayu Dwi Kurniawan (2020) membahas peran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa BPNT lebih banyak diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem yang umumnya tidak menyewa tempat tinggal dan memiliki anggota keluarga yang lebih banyak. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kemiskinan. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada bantuan sosial, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran pemerintah secara keseluruhan di Kota Parepare.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

aspek	Penelitian Terdahulu (Akhmad Fatikhurrizqi dan Bayu Dwi Kurniawan, 2020)	Penelitian Sekarang
Judul	Peran Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur Tahun 2020	Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Parepare
fokus	Bantuan sosial (BPNT) sebagai instrumen pengentasan kemiskinan	Peran pemerintah secara keseluruhan dalam penanggulangan kemiskinan
lokasi	Jawa timur	Kota parepare
Hasil	BPNT lebih banyak diberikan kepada rumah tangga miskin ekstrem. Rumah tangga miskin ekstrem cenderung tidak menyewa tempat tinggal dan memiliki anggota keluarga lebih banyak.	Menganalisis secara luas peran dan strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Parepare.
persamaan	Sama-sama membahas kemiskinan dan upaya mengatasi kemiskinan	Sama-sama membahas kemiskinan dan upaya mengatasi kemiskinan

perbedaan	Fokus pada bantuan sosial sebagai instrumen spesifik	fokus pada peran pemerintah secara menyeluruh

2 Penelitian yang dilakukan M. Elfan Kaukab pada tahun 2023 dengan judul Penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui sinergi pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan selama ini telah dibagi menjadi lima kategori, yaitu: (1) Aspek kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan; (2) Kebijakan dan penganggaran program untuk penanggulangan kemiskinan; (3) Sumber daya manusia; (4) Data dan informasi mengenai kemiskinan; dan (5) Sistem monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal tujuan yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan milik penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada lebih terarah pada kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem. Sedangkan milik penelitian terdahulu lebih menekankan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan.

3 Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli dan Cut Mega Putri pada tahun 2023 dengan judul "Peranan Bappeda dalam Pengentasan

Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Simeulue". Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pengentasan kemiskinan ekstrim yang ditinjau melalui empat dimensi belum optimal, dimana dari variabel peran wirausaha masih minim pekerjaan bagi masyarakat asli Simeulue. Kemudian variabel terakhir peran stimulus yaitu pemerintah daerah Simeulue, hanya menyediakan masyarakat yang berada dalam kondisi wilayah kemiskinan ekstrim, yang justru bisa membuat masyarakat Simeulue yang sangat miskin berkembang menjadi maju, seperti pelatihan komunikasi dan kewirausahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitain bahwa keduanya membahas isu kemiskinan ekstrem dan upaya untuk mengatasinya dalam konteks daerah masing-masing. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian ini Mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah secara keseluruhan mempengaruhi penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sedangkan milik penelitian terdahulu pada strategi perencanaan dan manajemen program yang dirancang oleh Bappeda.

4 Sebuah skripsi yang ditulis oleh Sitti Hajra pada tahun 2020 membahas implementasi peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Meskipun detail spesifiknya tidak tersedia dalam sumber yang saya miliki, skripsi ini pastinya akan mencakup strategi-strategi yang

digunakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Parepare, pemerintah telah melaksanakan beberapa program yang signifikan, termasuk PKH dan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM. Namun, masih perlu penelitian lanjutan untuk memahami dinamika yang lebih luas dan intervensi yang lebih efektif dalam konteks ekonomi dan sosial yang kompleks.

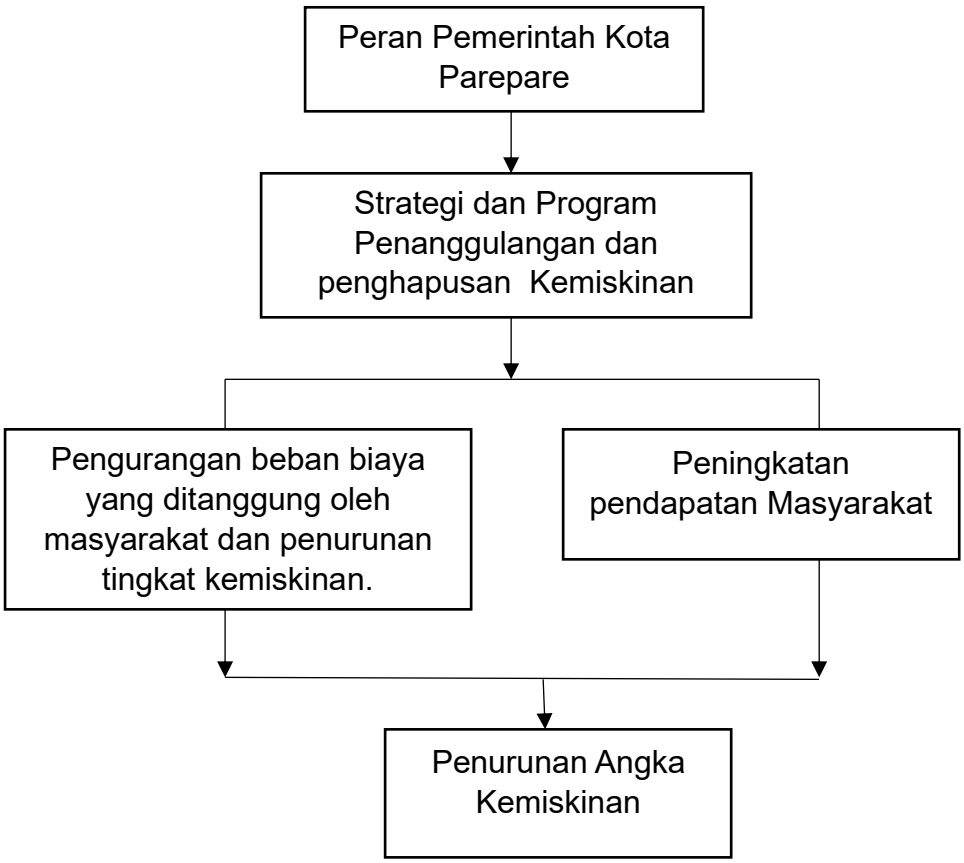
5 Penelitian lain yang dilakukan oleh Ansar Arifin dan Syamsul Bahri pada tahun 2021 membahas Penelitian tentang kelembagaan ketahanan pangan di Kota Parepare. ini menunjukkan bahwa Tradisional food security institutions telah ada Di kalangan Masyarakat nelayan miskin di Kota Parepare, sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, pertumbuhan jumlah penduduk, dan peningkatan kebutuhan pangan, memerlukan pengelolaan ketahanan pangan yang lebih rumit

C. Kerangka berpikir

1. Peran Pemerintah Kota Parepare Pemerintah Kota Parepare menjadi pihak utama yang berperan dalam menangani permasalahan kemiskinan di kota tersebut.
2. Strategi dan Program Penanggulangan dan Penghapusan KemiskinanPemerintah melaksanakan berbagai strategi dan program yang dirancang khusus untuk mengurangi dan

menghapus kemiskinan. Program ini adalah langkah konkret hasil dari peran pemerintah.

3. Pengurangan Beban Biaya Masyarakat Program yang dilaksanakan mampu mengurangi beban biaya hidup masyarakat, seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Hal ini secara langsung membantu menurunkan tingkat kemiskinan.
4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Program juga dirancang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, misalnya melalui pelatihan kerja, penciptaan lapangan kerja, atau bantuan modal usaha.
5. Penurunan Angka Kemiskinan Pengurangan beban biaya dan peningkatan pendapatan masyarakat secara bersama-sama akan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Kota Parepare.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, serta persepsi. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana peneliti berfokus pada pemahaman yang mendalam dan rinci mengenai objek yang diteliti serta memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang terkait dengan penelitian

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan lokasi penelitian di kota parepare sulawesi selatan , Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) karena instansi ini memiliki tugas dan kewenangan dalam menangani masalah kemiskinan di daerah kota parepare.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memiliki informasi atau data yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Informan bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini,

informan dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti. Adapun jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 4 orang, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Daftar Informan

No	Informan	Total
1	Kepala bidang	1 orang
2	Kepala ekonomi	1 orang
3	Staf	2 individu
	Jumlah keseluruhan	4 individu

Sumber : data yang diproses pada tahun 2024

D. Definisi operasional variabel

1. Kemiskinan Ekstrem

   Keadaan di Individu atau rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup dengan layak., termasuk makanan, tempat tinggal, dan akses terhadap layanan kesehatan.

   Indikator: Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan ekstrem. Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan sosial. Satuan: Persen (%), jumlah rumah tangga.

2. Peran Pemerintah

   Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem melalui program-program sosial dan ekonomi. Indikator: Jumlah program bantuan sosial yang

dilaksanakan (misalnya Program Keluarga Harapan). Tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah. Satuan: Jumlah program, persen (%).

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan proporsi yang sesuai dengan tujuan penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti atau pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan karyawan Pemerintah Kota Parepare.

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, seperti bahan pustaka, literatur, penelitian sebelumnya, buku, dan data dari BPS yang mencakup periode 2021-2023. Data sekunder yang diperoleh termasuk daftar kepegawaian kantor Dinas Sosial, data warga penerima bantuan sosial, serta data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada informan atau responden sesuai dengan informasi dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk saling bertukar informasi mengenai suatu topik tertentu, melalui proses tanya jawab, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) , Adapun alasan peneliti mewawancarai pegawai Kantor badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Karena informasi yang diperoleh dari narasumber tersebut sangat penting untuk tahap analisis data menggunakan metode triangulasi data yang dilakukan oleh peneliti

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang dihasilkan oleh seseorang. Dokumen tertulis bisa mencakup catatan harian, sejarah, kehidupan,

peraturan, atau kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa dokumen seperti daftar jumlah pegawai di kantor, peta wilayah, dan dokumen relevan lainnya. kerja Kantor badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA), serta data mengenai warga dengan kemiskinan ekstrem yang diperoleh dari desa.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data, namun peneliti memilih teknik yang sesuai dengan konteks penelitian ini. Berikut adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam analisis penelitian ini:

Tujuan validitas data adalah untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah yang sah dan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh. Sugiono menyatakan bahwa dalam uji kredibilitas ini, triangulasi berarti pengecekan informasi dari sumber yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda. Triangulasi tersebut meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa informasi dari berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang ada. Peneliti kemudian membandingkan hasil observasi

dengan wawancara, serta hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia.

Teknik triangulasi menggunakan metode yang berbeda untuk memverifikasi data dari sumber yang sama. Informasi yang diperoleh melalui wawancara kemudian diverifikasi dengan observasi dan dokumen. Jika ketiga teknik verifikasi memberikan informasi yang berbeda, peneliti akan berdiskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan atau pihak lain untuk menentukan informasi mana yang dianggap paling valid atau apakah semua informasi tersebut dapat dianggap benar dari perspektif yang berbeda.

Triangulasi waktu juga dapat memengaruhi kredibilitas informasi. Pengumpulan data melalui wawancara di pagi hari, ketika informan masih segar, memberikan informasi yang lebih valid dan kredibel. Oleh karena itu, pengujian kredibilitas data melalui wawancara, observasi, atau teknik lainnya dapat dilakukan pada waktu yang berbeda. Jika hasil tes memberikan informasi yang berbeda, maka pengumpulan data tersebut akan diulang beberapa kali untuk memastikan keakuratan informasi.

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Hasil penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 76 Parepare dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127) yang ditndaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Peraturan Walikota Nomor 72 tahun 2016 selanjutnya diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Walikota melalui Sekretaris Derah Kota Parepare.

1. Tugas pokok dan fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
c. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; dan

B. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsi.Visi dan Misi BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

1. Visi BAPPEDA

Terwujudnya institusi perencana yang visioner, partisipatif, profesional, dan akuntabel.

2. Misi BAPPEDA

   a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur perencana

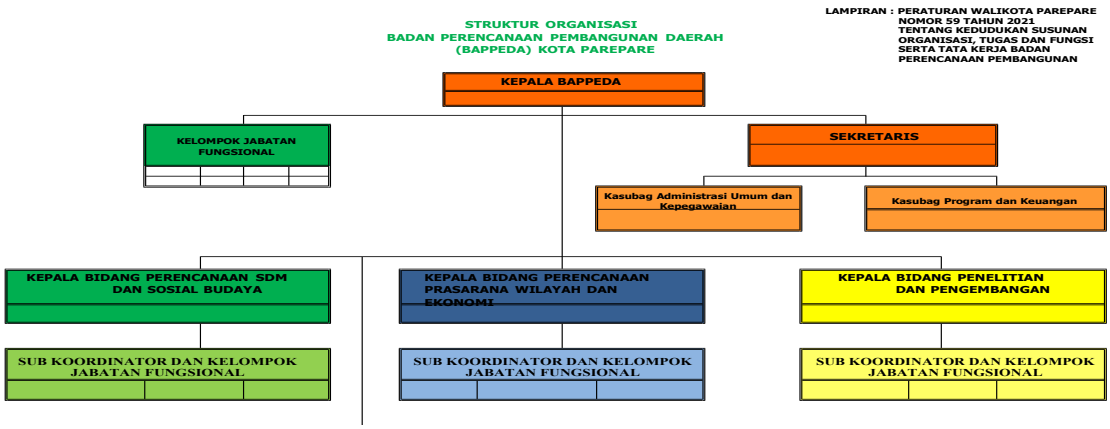
   b. Mengembangkan sarana dan prasarana perencanaan

   c. Meningkatkan kualitas perencanaan

   d. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

C. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bappeda parepare



Sumber*: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2024*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare memiliki struktur organisasi yang ditetapkan untuk tahun 2024. Berikut adalah rincian mengenai susunan organisasi Bappeda Parepare.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Angka Kemiskinan

a. Data Penduduk Tahun 2019-2023

Jumlah penduduk Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk KotaParepare Adapun Penyebaran penduduk Kota Parepare dari Tahun 2019-2023 terlihat pada tabel ini:

Tabel 5. 1 jumlah penduduk tahun 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Bacukiki	21.239	25.511	26.327	28.129	27.424
Bacukiki Barat	44.186	45.197	45.660	45.934	47.733
Ujung	33.463	33.843	33.863	33.758	36.479
Soreang	46.292	46.903	47.072	47.033	48.673
Jumlah	145.180	46.903	152.922	154.854	160.309

Sumber : BPS kota parepare tahun 2019-2023

b. Angka Kemiskinan Kota Parepare

Garis Kemiskinan merujuk pada tingkat pendapatan minimum yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar guna mencapai standar hidup yang layak di suatu negara.Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum

yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Garis Kemiskinan Kota Parepare Tahun 2023 sebesar Rp. 445.032,-/Bulan/Kapita. Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp. 436.025,-/Bulan/Kapita, sedangkan Garis Kemiskinan Nasional tercatat sebesar Rp. 582.932,-/Bulan/Kapita.

Gambar 5. 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Parepare Tahun 2019 – 2023 (P0)



Sumber : data BPS Kota Parepare

Berdasarkan uraian gambar 3.1, bahwa ditahun 2019 persentase penduduk miskin Kota Parepare yaitu 5,26 persen, pada 2020 mengalami peningkatan mencapai 5,44 persen, pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan mencapai 5,40 persen dan

ditahun 2022 kembali meningkat sebesar 5,41 persen, namun ditahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 5,34 persen.

Gambar 5. 2 Persentase Penduduk Miskin Kota Parepare Tahun 2019 – 2023



Sumber : data BPS Kota Parepare

Berdasarkan uraian gambar 3.2, bahwa ditahun 2019 jumlah penduduk miskin Kota Parepare sebanyak 7.620 jiwa, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 7.960 jiwa dan ditahun 2021 menurun menjadi 7.930 jiwa, dan pada tahun 2022 naik menjadi 8.010 Jiwa serta ditahun 2023 terjadi penurunan lagi sebanyak 7.980 jiwa.

Gambar 5. 3 Indeks Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan Kota Parepare Tahun 2019 – 2023



Sumber : Data BPS Prov. Sulawesi Selatan

*Mencermati Gambar 3.3, Pada tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Parepare 0,71 persen namun ditahun 2020 mengalami penigkatan yang signifikan sebesar 0,94 persen, ditahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,72 persen dan ditahun 2022 turun menjadi 0,56 persen, serta pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 0,58 persen.*Gambar 5. 4 Indeks Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan Kota Parepare Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data BPS Prov. Sulawesi Selatan

Mencermati Gambar 3.4, Pada tahun 2019 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Parepare sebesar 0,15 persen dan ditahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 0,24 persen, sedangkan ditahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,13 persen, dan ditahun 2022 turun menjadi 0,09 persen serta ditahun 2023 meningkat menjadi 0,12 persen.

2. Peran Pemeritah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Ekstremn Di Kota Parepare

Peran Pemerintah Kota Parepare dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sangat signifikan, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya. Upaya pemerintah diarahkan pada pengentasan kemiskinan melalui program-program strategis yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup langkah-langkah komprehensif untuk mengidentifikasi kelompok rentan dan memastikan mereka mendapatkan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dengan demikian, pemerintah berperan tidak hanya sebagai penyedia kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia.

salah satu strategi utama adalah penerapan program berbasis inklusi sosial. Pendekatan ini memastikan kelompok rentan dilibatkan secara aktif dalam berbagai program pemberdayaan. Kelompok rentan meliputi kaum miskin ekstrem, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga. Inklusi sosial menjadi upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial. Program ini juga meningkatkan kapasitas individu dan komunitas. Peningkatan kapasitas mendorong partisipasi dalam pembangunan. Langkah ini menciptakan efek domino yang positif dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Pemerintah Kota Parepare, peran

pemerintah dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sangatlah signifikan. Beliau menyampaikan bahwa:

> "Peran Pemerintah Kota Parepare sangat besar dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Parepare."

Langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi program-program berbasis inklusi sosial, pemberdayaan masyarakat, serta alokasi anggaran yang fokus pada kebutuhan kelompok rentan. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga non-pemerintah,

untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Pemerintah Kota Parepare berharap dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kategori miskin ekstrem.

Alokasi anggaran yang berfokus pada kebutuhan kelompok rentan menjadi pilar penting dalam strategi ini. Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan dana yang cukup untuk program-program yang secara langsung menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem. Contohnya adalah bantuan tunai langsung, pelatihan keterampilan kerja, dan subsidi kebutuhan dasar. Kebijakan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Parepare bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga non-pemerintah dan organisasi

dengan masyarakat sipil, untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Kemitraan ini memungkinkan pemerintah memperluas cakupan program dan memanfaatkan keahlian pihak ketiga dalam mengelola intervensi yang tepat sasaran. Kolaborasi ini juga berperan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menangani masalah kemiskinan, seperti digitalisasi pelayanan publik dan penguatan data terintegrasi.

Dengan pendekatan yang komprehensif, Pemerintah Kota Parepare berharap dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus pada inklusi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor diyakini akan memberikan dampak yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan semua elemen masyarakat dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Parepare.

a. Pengelolaan Data Kemiskinan Ekstrim

Pemerintah Kota Parepare sangat memahami bahwa keberhasilan intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem harus dimulai dari ketersediaan data yang valid. Olehnya itu, Pemerintah Kota Parepare telah melakukan verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diperoleh dari Kemenko PMK dan telah

dipadupadankan dengan Data Hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Bappenas. Ketersediaan data yang valid akan menghasilkan intervensi program yang tepat sasaran.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sekitar 7.980 jiwa, yang setara dengan 5,34% dari total penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan Maret 2022, di mana jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 8.010 jiwa atau 5,41% dari total penduduk. Namun, laporan lain menyebutkan bahwa pada November 2024, persentase penduduk miskin di Kota Parepare turun menjadi 5,27%. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin tetap berada di kisaran 8.010 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk miskin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk inflasi pangan yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Parepare telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti Lazismu, untuk meluncurkan program-program yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan di kota tersebut.

Selain itu, data dari BPS melaporkan bahwa selama 10 tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kota Parepare mengalami tren penurunan, dari 6,08% menjadi 5,27%. Meskipun demikian, tantangan dalam pengentasan kemiskinan masih ada, terutama

terkait dengan faktor-faktor ekonomi seperti inflasi dan daya beli masyarakat.

Pemerintah Kota Parepare terus berupaya melalui berbagai program dan kebijakan Untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan, berikut adalah data persentase penduduk miskin di Kota Parepare dari tahun 2019 hingga. 2024:

Tabel 5. 2 Persentase Penduduk Miskin 2019-2024

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
2019	5,26%
2020	5,34%
2021	5,41%
2022	5,34%
2023	5,34%
2024	5,27%

Sumber : BPS kota parepare tahun 2019-2024

Data ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Parepare mengalami fluktuasi selama periode tersebut, dengan tren penurunan yang konsisten sejak tahun 2021.

Perlu dicatat bahwa data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dapat diakses melalui situs resmi BPS Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare terus berusaha mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai program. dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b. Perumusan Kebijakan

Perumusan Kebijakan yang tepat akan menentukan keberhasilan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kota Parepare telah merumuskan kebijakan yang berbasis data dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Salah satu kebijakan yang dirumsukan adalah memastikan seluruh masyarakat miskin ekstrem telah memiliki Jaminan Kesehatan Gratis dan penyediaan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan yang mudah diakses.

c. Pengalokasian Anggarana

Pemerintah Kota Parepare telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memastikan seluruh intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat berjalan lancar.

Pada Tahun 2023 jumlah total anggaran dalam penanggulangan kemiskinan Kota Parepare sebesar Rp 92,088,607,908,- (Sembilanm Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah) yang bersumber dari APBD maupun APBN. Anggaran tersebut terdiri dari program dan kegiatan yang berimplikasi langsung maupun tidak langsung ke penanggulangan kemiskinan.

d. Mengembangkan Kolaborasi Antar Stakeholder

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah, instansi vertikal, swasta, Lembaga masyarakat dan stakeholders lainnya. Pemerintah Kota Parepare telah berupaya membangun ekosistem percepatan pengahpusan kemiskinan ekstrem yang memungkinkan semua pihak dapat terlibat secara langsung. Salah satu contoh kolaborasi yang telah terbangu adalah Program Pemberian Bantuan Langsung Berkelanjutan kepada Masyarakat Miskin Ekstrem yang Non-Produktif melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, BAZNAS, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kota Parepare. Bantuan ini diberikan kepada 36 orang sasaran dalam bentuk natura dan atau uang tunai.

3. Starategi pemeritah dalam menanggulangi kemiskinan ekstremn di kota parepare

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem, diperlukan strategi yang terencana dengan baik. Langkah pertama yang diambil oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Kota Parepare adalah melakukan pendekatan yang terfokus untuk mengidentifikasi dengan cermat individu atau keluarga yang membutuhkan bantuan. Proses ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik setempat untuk memperoleh data yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan hasil

wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosial. budaya pemerintah kota parepare menyebutkan bahwa Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam Percepatan Pengahpusan Kemiskinan Ekstrem, adalah :

a. Mengurangi Beban Pengeluaran

Strategi ini dilakukan melalui perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin, melalui BPJS Kesehatan Gratis, bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu dan Bantuan beras sejahtera. Hal lainyang dilakukan adalah menjaga kemampuan daya beli masyarakat melalui pengendalian harga agar tetap terjangkau melalui optimalisasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah. Hasil wawancara mengatakan bahwa

> “pemerintah menyediakan berbagai layanan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu atau mengalami kesulitan ekonomi. Layanan-layanan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal.”

Layanan sosial yang disediakan oleh pemerintah memiliki peran signifikan dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Salah satu contohnya adalah program BPJS Kesehatan Gratis yang memberikan akses layanan kesehatan tanpa memerlukan biaya besar. Dengan adanya layanan ini, masyarakat miskin dapat menerima pengobatan yang diperlukan tanpa khawatir akan

mahalnya biaya medis. Langkah ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Namun, ini juga berperan dalam membantu mereka mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan pangan.

Bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu juga menjadi bentuk konkret dari perlindungan sosial. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap pendidikan. Bantuan berupa seragam, alat tulis, dan buku sangat membantu orang tua yang kesulitan membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Dengan dukungan ini, tingkat partisipasi sekolah meningkat, yang pada akhirnya dapat membuka peluang bagi generasi muda untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Selain itu, bantuan beras sejahtera (Rastra) berfungsi sebagai penopang kebutuhan pangan dasar masyarakat miskin. Program ini memastikan bahwa setiap keluarga yang membutuhkan tetap Memiliki akses ke bahan pangan utama dengan harga yang sangat terjangkau atau bahkan gratis. Bantuan ini tidak hanya membantu menekan biaya rumah tangga, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan nasional. Dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, masyarakat dapat lebih fokus pada usaha peningkatan pendapatan atau pendidikan anak-anak mereka.

Optimalisasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga menjadi strategi penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau, pemerintah dapat mencegah beban ekonomi tambahan bagi masyarakat miskin. Pengendalian inflasi yang efektif menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil, sehingga masyarakat tidak perlu mengorbankan kebutuhan penting lainnya akibat kenaikan harga yang tidak terkendali.

Secara keseluruhan, layanan sosial ini memberikan dampak besar terhadap pengurangan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu. Dengan adanya akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pangan, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Upaya pemerintah ini tidak hanya meringankan tekanan ekonomi bagi masyarakat miskin tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan produktif. Berikut adalah pembahasan mengenai bagaimana layanan sosial ini membantu masyarakat dalam mengurangi pengeluaran mereka:

b. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah salah satu program yang sangat penting dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat terkait biaya kesehatan. Dengan memiliki KIS,

masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas tanpa harus membayar biaya yang besar. Hal ini sangat membantu keluarga dengan penghasilan rendah untuk mendapatkan perawatan medis yang layak tanpa terbebani biaya yang tinggi.

c. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

merupakan program yang memberikan bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Dengan adanya KIP, beban biaya pendidikan yang sering menjadi kendala utama bagi keluarga miskin bisa dikurangi. Anak-anak yang sebelumnya mungkin terhambat untuk melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya, kini dapat melanjutkan sekolah tanpa harus khawatir dengan biaya. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan kesempatan bagi generasi penerus untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

d. Program Keluarga Harapan (PKH)

adalah program bantuan sosial yang dirancang untuk mendukung keluarga yang kurang mampu. PKH memberikan bantuan tunai dengan syarat kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti keluarga dengan anak yang sedang bersekolah, ibu hamil, atau lansia.Bantuan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga dapat

mengurangi tekanan ekonomi keluarga dan memberi mereka kesempatan untuk hidup lebih layak.

e. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin. Dengan adanya BPNT, masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan bahan pangan seperti beras, telur, dan lainnya tanpa harus mengeluarkan uang secara tunai. Program ini memberikan kemudahan bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka, sekaligus mengurangi beban pengeluaran untuk makanan.

f. Meningkatkan Pendapatan

Upaya ini dilakukan melalui bantuan peralatan usaha bagi Masyarakat Miskin ekstrem, peningkatan keterampilan kerja, dan pelatihan manajemen usaha. masyarakat disana dalam memenuhi kebutuhannya yaitu bekerja, adapun bantuan yang di berikan berbagai macam seperti alat pertukangan, alat salon, alat menjahit, dan bantuan peralatan lainnya. Dari bantuan yang di berikan sangat bermanfaat karna masyarakat bisa memberdayakan dirinya dari bantuan yang diberikan dengan memanfaatkan bantuan tersebut hingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hasil wawancara mengatakan bahwa:

> program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini melalui mekanisme terstruktur yaitu diawali dengan usulan warga di setiap kelurahan yang biasa disebut musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan, selanjutnya ke musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan, dan seterusnya ketingkat kota. Temuan pada penelitian menunjukkan bahwa pada musyawarah pembangunan di tingkat Kecamatan, usulan masyarakat yang mewakili kelurahan hanya sebagian terakomodir.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini mengikuti mekanisme terstruktur yang dimulai dari tingkat kelurahan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kelurahan. Dalam forum ini, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan, termasuk program pengentasan kemiskinan. Hasil dari Musrenbang kelurahan kemudian dibawa ke tingkat kecamatan dalam Musrenbang kecamatan, di mana berbagai usulan dari kelurahan disatukan, dievaluasi, dan diprioritaskan sebelum diteruskan ke tingkat kota untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan, sekaligus menyesuaikan program dengan kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua usulan masyarakat dari tingkat kelurahan dapat terakomodasi dalam Musrenbang kecamatan. Hanya sebagian usulan yang dianggap prioritas oleh pemangku kepentingan di tingkat

kecamatan yang diteruskan ke tahap berikutnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, perbedaan persepsi prioritas antara masyarakat dan pemerintah, serta keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses musyawarah. Akibatnya, sebagian kebutuhan masyarakat yang dianggap penting oleh warga di tingkat kelurahan tidak mendapatkan perhatian di tingkat yang lebih tinggi, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas program dalam menjawab kebutuhan mendesak terkait penanggulangan kemiskinan.

g. Mengurangi Kantong-Kantong Kumuh

Strategi ini dilakukan melalau penataan Kawasan permukiman kumuh khususnya terkait dengan sanitasi yang aman dan sehat bagi keluarga miskin ekstrem serta bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Selanjutnya Program bantuan perbaikan rumah pihak ketigakan kepada masyarakat yang memiliki skill tentang perumahan, dari tujuh unit rumah yang di perbaiki pada umumnya atap, dinding, serta lantai (papan) dan yang meluncurkan dana ini bervariatif antara Rp 5000.000 s/d Rp 75.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka diketahui bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan terlebih dahulu diliat dari kondisi rumah sebelumnya, selanjutkan apabila tidak memungkinkan maka akan direkomendasikan untuk

mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Adapun perbaikan rumah yang dilakukan meliputi perbaikan atap rumah, dinding, dan rumah utuh.

Adapun kisaran yang diberikan untuk perbaikan rumah yaitu Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 75.000.000. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa warga yang mendapatkan perbaikan rumah sangat bervariasi mulai dari perbaikan atap rumah, dinding, dan ada yang mendapatkan perbaikan rumah secara menyeluruh. Anggaran yang di butuhkan untuk setiap perbaikan atap rumah kurang lebih Rp 8.000.000 tergantung kerusakan rumah. adapun untuk perbaikan rumah secara menyeluruh dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp 75.000.000.

B. Pembahasan

1. Peran Pemeritah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Ekstremn Di Kota Parepare

Pemerintah Kota Parepare telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani kemiskinan ekstrem melalui berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan langsung, tetapi juga mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Keberhasilan upaya ini sangat

bergantung pada kolaborasi antar sektor pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat.

Dalam hal ini, pendekatan berbasis inklusi sosial menjadi landasan penting dalam merancang dan melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang paling rentan, memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan sosial yang ada. Pandangan Kabeer (2015) menyatakan bahwa kebijakan inklusi sosial adalah kunci untuk mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Program pemberdayaan masyarakat di Kota Parepare bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pembinaan kewirausahaan, masyarakat didorong untuk dapat menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri maupun orang lain.

Selain itu, program-program ini juga difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, yang menjadi faktor penting dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Program pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi angka kemiskinan di beberapa daerah (Handayani et al.,

2020). Oleh karena itu, program-program ini Menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi kemiskinan. di Kota Parepare.

Pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kota Parepare tidak dapat dipandang sebelah mata. Pemerintah Kota Parepare bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program. Salah satu contoh kolaborasi yang signifikan adalah kerjasama dengan lembaga zakat, seperti Lazismu, dalam memberikan bantuan kepada keluarga miskin melalui program-program seperti bantuan pangan, perumahan, dan pendidikan.

Kerjasama semacam ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih luas dan meningkatkan keberlanjutan program, sebagaimana diungkapkan oleh Bhan dan Jana (2020), yang menyebutkan bahwa kemitraan lintas sektor dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi semacam ini juga memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya mencakup pemberian bantuan jangka pendek, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang untuk masalah kemiskinan.

Pemerintah Kota Parepare juga telah memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap data masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Data ini menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi potensi kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga dapat memberikan respon yang lebih cepat dan tepat sasaran. Sejalan dengan hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data kemiskinan meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan karena dapat mengurangi kesalahan dalam pendataan dan mempercepat distribusi bantuan.

Data yang akurat dan terpercaya sangat penting dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kota Parepare melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan dengan melibatkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK dan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Bappenas. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif. Hal ini sangat penting mengingat adanya kelompok-kelompok yang mungkin tidak terdata dalam survei awal namun sesungguhnya berada dalam kondisi rentan.

Dengan memiliki data yang lebih akurat, pemerintah dapat merancang program-program yang lebih tepat dan terfokus pada kelompok yang membutuhkan. Penelitian oleh Fiszbein dan Schady

(2009) juga menekankan pentingnya penggunaan data yang valid untuk memastikan pengalokasian anggaran yang efisien dan tepat sasaran dalam program-program pengentasan kemiskinan.

Dalam hal anggaran, Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan dana yang signifikan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 92,08 miliar untuk berbagai program yang bertujuan mengurangi kemiskinan ekstrem, seperti bantuan langsung tunai, subsidi pangan, dan program pelatihan keterampilan.

Anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan, meskipun tantangan yang dihadapi masih besar, terutama dalam hal inflasi pangan yang mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Penelitian oleh Fiszbein dan Schady (2009) menyebutkan bahwa alokasi anggaran yang memadai adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengentasan kemiskinan, karena memastikan bahwa program-program yang dijalankan dapat menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan.

Seiring dengan itu, kebijakan alokasi anggaran yang tepat sasaran diharapkan dapat mempercepat proses pengurangan kemiskinan. Pemerintah Kota Parepare, melalui program-programnya, Bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin melalui pemberian bantuan langsung yang dapat

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan.Selain itu, alokasi anggaran juga digunakan untuk mendukung kegiatan yang mendorong peningkatan pendapatan, seperti program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program-program ini tidak hanya memberikan bantuan sosial tetapi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan mandiri secara ekonomi.

Namun, meskipun telah ada berbagai kebijakan yang diterapkan, masih terdapat tantangan besar dalam menghadapi kemiskinan ekstrem. Salah satu tantangan utama adalah inflasi pangan yang dapat meningkatkan biaya hidup dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin. Pemerintah Kota Parepare berupaya mengatasi hal ini dengan berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan dan peningkatan produksi lokal. Program ketahanan pangan yang melibatkan petani lokal dan koperasi juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan yang baik dapat mengurangi dampak inflasi terhadap masyarakat miskin (Fiszbein & Schady, 2009).

Pemerintah Kota Parepare juga memanfaatkan program-program nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan. Misalnya,

program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka, meskipun dihadapkan pada kondisi ekonomi yang sulit. Penelitian oleh Bhan dan Jana (2020) menunjukkan bahwa program semacam ini dapat memperbaiki akses terhadap pangan bagi keluarga miskin, serta membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dengan meningkatkan daya beli keluarga miskin.

Selain bantuan langsung, program pemberdayaan ekonomi menjadi elemen penting dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kota Parepare. Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan pelatihan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk penyuluhan tentang kewirausahaan dan manajemen keuangan. Program-program ini bertujuan untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat miskin, sekaligus meningkatkan keterampilan mereka agar dapat bersaing di pasar kerja. Penelitian oleh Kabeer (2015) menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan penyuluhan adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Pemerintah Kota Parepare juga berusaha memperkuat jejaring sosial bagi masyarakat miskin Dengan melibatkan mereka dalam

aktivitas sosial dan budaya. Kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan sosial antarwarga, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperluas jaringan dukungan yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program-program sosial yang akan dijalankan. Ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima dengan baik oleh mereka.Secara keseluruhan, upaya Pemerintah Kota Parepare dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem mencerminkan sebuah pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan berbagai pihak dan sektor. Dengan menggabungkan bantuan langsung, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap dapat menciptakan perubahan jangka panjang dalam kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, tantangan seperti inflasi pangan dan ketidakmerataan distribusi bantuan masih perlu diatasi untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.

2. Starategi pemeritah dalam menanggulangi kemiskinan ekstremn di kota parepare

Strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kota Parepare melibatkan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada data yang akurat. Langkah pertama yang diambil adalah identifikasi keluarga atau individu yang membutuhkan bantuan, yang dilakukan dengan kolaborasi bersama Badan Pusat Statistik daerah untuk mendapatkan data yang diperlukan.

tepat (Kementerian sosial, 2020). Dalam hal ini, Kepala Bidang Sosial Budaya Kota Parepare menekankan pentingnya strategi terarah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama dengan cara Mengurangi tekanan pengeluaran pada masyarakat miskin melalui sistem perlindungan sosial. Program yang ditawarkan, seperti BPJS Kesehatan Gratis dan bantuan perlengkapan sekolah, bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar yang vital, sehingga membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar tanpa terbebani biaya yang tinggi (Kementerian Sosial, 2018).

Program BPJS Kesehatan Gratis memiliki dampak signifikan dalam mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat miskin. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus memikirkan biaya yang sering kali menjadi kendala utama. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Sari et al.

(2019), yang menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Melalui program ini, masyarakat miskin tidak hanya mendapatkan perawatan medis yang diperlukan tetapi juga dapat men galokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan dan pangan.

Selain itu, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin di sektor pendidikan. Program ini menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan pendapatan rendah, sehingga mereka dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial. khawatir dengan biaya sekolah. Program serupa juga telah terbukti efektif dalam mengurangi angka putus sekolah di daerah miskin, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Dewi dan Aulia (2017), yang menilai dampak KIP terhadap peningkatan partisipasi pendidikan di masyarakat miskin. Program KIP memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di masa depan.

Salah satu strategi penting lainnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti keluarga

dengan anak sekolah, ibu hamil, atau lansia. Menurut riset oleh Arifianto (2020), PKH telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, dengan memberikan dukungan finansial yang dapat digunakan untuk kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. PKH juga berfungsi sebagai alat untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup, terutama bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang memberikan bantuan bahan pangan seperti beras, telur, dan lainnya, juga memiliki peran penting dalam mengurangi pengeluaran masyarakat miskin. Program ini memberi kemudahan bagi keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka, sekaligus membantu menekan biaya hidup sehari-hari. Penelitian oleh Sutrisno dan Wijayanti (2018) menyatakan bahwa bantuan pangan berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan keluarga miskin dan membantu mereka dalam meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, BPNT dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mendukung masyarakat miskin agar tidak terperosok lebih dalam ke dalam kemiskinan ekstrem.

Selain fokus pada pengurangan pengeluaran, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin ekstrem melalui bantuan peralatan usaha dan pelatihan keterampilan. Program ini memberikan peluang kepada masyarakat

untuk memanfaatkan bantuan seperti alat pertukangan, alat salon, dan alat menjahit, yang dapat digunakan untuk membuka usaha atau meningkatkan usaha yang sudah ada. Penelitian oleh Widiastuti (2019) menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mendorong mereka untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi ini menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Parepare.

Meskipun banyak Usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua usulan dapat terakomodasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini adalah keterbatasan anggaran, perbedaan prioritas antara masyarakat dan pemerintah, serta keterbatasan waktu dalam proses musyawarah (Simanjuntak, 2020). Sebagai contoh, hanya sebagian dari usulan masyarakat yang dianggap prioritas yang diteruskan ke tingkat kecamatan dan kota. Hal ini menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa kebutuhan mendesak dari masyarakat miskin dapat segera ditangani.

Selain itu, penataan kawasan permukiman kumuh dan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi strategi penting dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan di Kota Parepare.

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, dengan anggaran perbaikan bervariasi antara Rp 5.000.000 hingga Rp 75.000.000, tergantung pada tingkat kerusakan rumah. Penelitian oleh Kusnadi et al. (2020) menunjukkan bahwa perbaikan rumah tidak hanya memberikan manfaat dari segi fisik tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mental masyarakat miskin.

Dalam hal ini, pemerintah mengutamakan keberlanjutan program dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki keterampilan dalam perbaikan rumah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat lebih besar dari bantuan yang diterima. Program ini juga menekankan pada pentingnya sanitasi yang aman dan sehat bagi keluarga miskin ekstrem, yang turut berperan dalam mengurangi beban kesehatan masyarakat (Prasetyo, 2019). Dengan perbaikan rumah yang lebih layak, masyarakat miskin dapat hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan aman, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kualitas hidup mereka.

Secara keseluruhan, strategi pemerintah Kota Parepare dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem mencakup pendekatan yang multi-dimensional, yang melibatkan pengurangan beban pengeluaran, pemberdayaan ekonomi, perbaikan kondisi perumahan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Strategi ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Santoso (2018), yang menunjukkan

bahwa pendekatan terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, dapat memberikan hasil yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kota Parepare melalui program-programnya telah memberikan kontribusi besar dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem, namun tantangan masih ada dalam memastikan semua usulan masyarakat dapat terakomodasi dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kota Parepare berkomitmen mengatasi kemiskinan ekstrem melalui pendekatan inklusi sosial, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi. Program difokuskan pada pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, bantuan sosial, serta pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Langkah nyata yang dilakukan antara lain BPJS Kesehatan gratis, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan peralatan usaha, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah juga menekankan pentingnya validasi data dan penyaluran anggaran yang tepat sasaran untuk meningkatkan efektivitas program.

Tantangan seperti inflasi pangan direspons melalui kebijakan stabilisasi harga dan penguatan ketahanan pangan lokal. Dukungan dari lembaga zakat dan program nasional turut memperluas jangkauan bantuan. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Parepare tetap menjaga keberlanjutan program dengan pendekatan berbasis data dan kolaboratif. Strategi ini secara bertahap menunjukkan hasil positif dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Parepare menangani kemiskinan ekstrem melalui pendekatan inklusi sosial, yang melibatkan masyarakat secara aktif, serta kolaborasi lintas sektor dengan lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat. Pemanfaatan teknologi digunakan untuk validasi data yang akurat, memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif.
2. Fokus utama pemerintah meliputi pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta dukungan alat produksi. Program nasional seperti BPJS Kesehatan Gratis, PKH, KIP, dan BPNT, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin ekstrem.
3. Tantangan seperti inflasi pangan diatasi melalui kebijakan stabilisasi harga dan ketahanan pangan lokal. Pendekatan berbasis data serta kerjasama dengan lembaga zakat dan mitra lainnya memastikan program berkelanjutan dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arifianto, M. (2020). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 9*(1), 45–58.

Astuti, D. (2024). Strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan konvergensi dan inovasi program. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(3), 355–363.

Bhan, S., & Jana, P. (2020). *Social Inclusion and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia.* Cambridge University Press.

Dewi, S. P., & Aulia, R. (2017). Dampak Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap partisipasi pendidikan di daerah miskin. *Jurnal Pendidikan dan Sosial, 15*(2), 102–113.

DwiKartini, B. Y. P., Budiati, A., & Cadith, J. (2024). Penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Cilegon. *Jurnal Niara, 16*(3), 542–551.

Fiszbein, A., & Schady, N. R. (2009). Transfer Tunai Bersyarat: Mengurangi Kemiskinan Saat Ini dan Masa Depan. Bank Dunia.Handayani, S., Pramudya, A. R., & Dwiastuti, W. (2020). Pemberdayaan ekonomi melalui program pelatihan kewirausahaan di masyarakat miskin. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, 15*(2), 123–138.

Hidayati, M., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2024). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. *Respon Publik, 18*(1), 1–10.

Idris, F., Mukhrijal, M., & Rassanjani, S. (2023). Efektivitas Program Rumah Layak Huni dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 1,* 37–50.

Kabeer, N. (2015). The politics of social protection: A critical perspective. *Development and Change, 46*(5), 986–1005.

Kementerian Sosial. (2018). *Laporan Tahunan Program Perlindungan Sosial 2018.* Jakaa: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kementerian Sosial. (2020). *Peta Kemiskinan Ekstrem di Indonesia.* Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kusnadi, A., Suyanto, A., & Widyawati, I. (2020). Peran bantuan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan pada kelompok rentan. *Jurnal Kebijakan Publik, 12*(3), 215–228.

Pemerintah Kota Parepare. (2023). *Laporan Tahunan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023.* Dinas Sosial Kota Parepare.

World Bank. (2018). Laporan Pembangunan Dunia 2018: Belajar untuk Merealisasikan Janji Pendidikan. Kelompok Bank Dunia.

Desrinelti Desrinelti, M. A. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 83-84.

Lusya Vivi Gorahe, F. W. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. *EKSEKUTIF Jurnal Volume 1 No. 1 Tahun 2021*, 2.

Masloman, I. (2018). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA SEKTOR YANG POTENSIAL DAN BARDAYA SAING DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN . *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* , 48-49.

Noor, M. (2011). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I,*, 88.

Selvia Wulandari, R. S. (2022). PRISIP MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBAGUNAN INFASTRUKTUR DI KABUPATEN KATINGAN (Studi Di Desa Tumbang Lahang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 152.

Selvia Wulandari, R. S. (2022). PRISIP MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBAGUNAN INFASTRUKTUR DI KABUPATEN KATINGAN (Studi Di Desa Tumbang Lahang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 152-153.

Baharuddin, B. (2019). Produktivitas kerja dalam perspektif ekonomi Islam. Balanca: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 35–55.

Ladung, F. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Parepare. ECONOMOS: *Jurnal* Ekonomi dan Bisnis, 1(2), artikel No. 573

Fitriani, F. (2018). Pengaruh sektor pariwisata, sektor industri, dan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Parepare (tahun 2004–2016). ECONOMOS*: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).

Syukri, F., Zakariah, J., Aminuddin, A., & Alamsyah, A. (2020). Analisis sektor unggulan dalam menunjang pembangunan ekonomi di Kota Parepare. ECONOMOS: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1).